



**PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA DUMAI**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

DWI RAMADHAN
NIM. 11775101416

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA DUMAI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian
Oral Komprehensif Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

DWI RAMADHAN
NIM. 11775101416

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islam State of Indonesia Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: DWI RAMADHAN

: 11775101416

: ILMU ADMINISTRASI NEGARA

: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

: PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA DUMAI

: SELASA, 20 APRIL 2021

DISETUJUI OLEH
Dosen Pembimbing

Irdayanti, S.IP, MA
NIP. 230 411 030

[Signature]
MENGETAHUI

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. Drs. Muh. Sa'd HM, M.Ag, M.M
NIP. 19620512 198903 1 003

Ketua Jurusan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: DWI RAMADHAN

: 11775101416

: ILMU ADMINISTRASI NEGARA

: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

: PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA DUMAI

: SELASA, 20 APRIL 2021

DISAHKAN OLEH :
KETUA PENGUJI

FAKHRURROZI, SE,MM
NIP. 19670725 2000031 002

PENGUJI I

DEVI DESWIMAR, S.Sos., M.Si.
NIP. 130 411 027

PENGUJI II

MHD. RAFI, S.Sos., M.Sc
NIP. 130 717 059

- Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak atau menyalin atau membuat tiruan atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari Penguji atau Penguji.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DUMAI DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER

Oleh :
DWI RAMADHAN
11775101416

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah kota Dumai dalam melaksanakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah demi mewujudkan kesetaraan gender dan melihat apa saja kebijakan dan program yang telah dilakukan pemerintah kota Dumai dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi, hasil data yang di peroleh kemudian di analisa. Dalam mewujudkan kesetaraan gender di kota Dumai pemerintah kota Dumai mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan dan program-program yang responsif gender. Dalam penyusunan kebijakan-kebijakan tersebut menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) yang merupakan alat untuk menyusun rencana pembangunan daerah yang responsif gender. Dalam pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender, pemerintah kota Dumai mempunyai pegawai-pegawai yang terlatih dan bersertifikat sebagai fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG). Kemudian dalam menjalankan kebijakan kesetaraan gender pemerintah kota Dumai memperoleh anggaran dari APBD dan juga dari Non-APBD, yang mana anggaran tersebut disusun dengan menggunakan analisis gender yaitu dengan Gender Budget Statement (GBS).

Kata kunci : Kesetaraan Gender



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada terkira, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul ***“Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Dikota Dumai”*** guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yang saya hormati dan sangat saya sayangi kedua orang tua Ibunda Ida Rosida dan Ayahanda Afdal Zen yang telah merawat dan mendidik saya dari kecil hingga saat ini dengan penuh kesabaran, yang selalu memberikan dukungan dan selalu berkorban agar saya bisa mencapai cita-cita untuk menjadi seorang sarjana. Untuk itu skripsi di persembahkan untuk kedua orang tua tercinta.
2. Bapak Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag Selaku Rektor Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

3. Bapak Drs.H.Muh Said HM, M.Ag, MM Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Dosen Pembimbing Skripsi Ibuk Irdyanti S.IP., MA
6. Pembimbing Akademik Bapak Afrinaldi Rustam, S.IP., M.Si
7. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas ekonomi dan Ilmu Sosial
8. Ibuk Dameira, SKM, M.Si selaku kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Bidang Ketahanan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai.
9. Ibuk Sri Triani Indari, SKM Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai.
10. Ibuk Dewi Yasmanidar, SKM Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ketahanan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai.
11. Ibuk Wahyu Ratna, SKM, M.Kes kepala Unit Pelaksana Teknid Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kota Dumai.
12. Seluruh pegawai dan staf kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Bidang Ketahanan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai.
13. Seluruh pegawai dan staf Bagian Umum kantor Walikota Dumai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Teman-teman seperjuangan Lokal C Administrasi yang saya sayangi, teman-teman Mahasiswa Akhir Zaman, teman-teman PKL DUMAI JAYA, dan teman-teman KKN DUDIDAM, teman-teman PASUKAN TERBAIK yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang sangat saya sayangi dan saya banggakan.
15. Teman-teman yang selalu membantu selama melakukan penelitian Risky Winanda, Muhammad Risky Maulanayon, Muhammad Aditia, terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama melakukan peneltian.
16. Dan semua pihak yang telah membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung, penulis mengucapkan terimakasih banyak atas bantuannya.

Sebagai manusia biasanya, tentunya penulis mempunyai kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi dapat bermanfaat untuk masa yang akan datang.

Duri, 7 April 2021

Penulis

DWI RAMADHAN
NIM. 11775101416



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | I |
| KATA PENGANTAR..... | II |
| DAFTAR TABEL | VIII |
| DAFTAR GAMBAR..... | IX |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah..... | 9 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 10 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian..... | 10 |
| 1.5 Sistematika Penulisan..... | 11 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 13 |
| 2.1 Implementasi Kebijakan..... | 13 |
| 2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan..... | 15 |
| 2.3 Pengarusutamaan gender (PUG) | 17 |
| 2.4 Pembangunan | 21 |
| 2.5 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah | 23 |
| 2.6 Tantangan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender | 25 |
| 2.7 Pandangan Islam Terhadap Kesetaraan Gender | 29 |
| 2.8 Penelitian Terdahulu..... | 30 |
| 2.9 Defenisi Konsep | 33 |
| 2.10 Operasional Konsep | 34 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|-----------|
| 2.11 Kerangka Pemikiran | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 37 |
| 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian | 37 |
| 3.2 Jenis dan Sumber Data | 37 |
| 3.2.1 Jenis | 37 |
| 3.2.2 Sumber Data | 37 |
| 3.3 Informan Penelitian | 38 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data | 39 |
| 3.5 Teknik Analisa Data | 41 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 43 |
| 4.1 Gambaran Umum Kota Dumai..... | 43 |
| 4.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai | 48 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 53 |
| 5.1 Kebijakan Pemerintah Kota Dumai Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Pengarusutamaan Gender..... | 53 |
| 5.2 Kebijakan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kota Dumai..... | 54 |
| 5.3 Masalah dan isu-isu kesetaraan gender di Kota Dumai | 58 |
| 5.4 Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Di Kota Dumai | 61 |
| 5.4.1 Komunikasi..... | 61 |
| 5.4.2 Sumber Daya..... | 63 |
| 5.4.3 Disposisi..... | 65 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|-----------|
| 5.4.4 Struktur Birokrasi | 66 |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... | 70 |
| 6.1 Kesimpulan..... | 70 |
| 6.2 Saran | 71 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.9 Penelitian Terdahulu | 30 |
| Tabel 2.10 Operasional Konsep | 35 |
| Tabel 3.1 Informan Penelitian..... | 38 |
| Tabel 4.1 Daftar Kecamatan Dan Ibu Kota Kecamatan Beserta Luas Wilayah Masing-Masing Kecamatan..... | 47 |
| Tabel 5.2 Kegiatan/Program Kesetaraan Gender Di Kota Dumai | 56 |
| Tabel 5.4.1 Sumber Daya Kesetaraan Gender Pemerintah Kota Dumai | 63 |
| Tabel 5.4.2 Anggaran..... | 64 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar Taman Terbuka Ramah Anak (Tatera)..... | 58 |
|---|----|





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan nasional merupakan pembangunan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, baik laki- laki ataupun wanita. Dalam UUD 1945 Pasal 27 dinyatakan kalau terdapatnya jaminan kesamaan hak untuk segala masyarakat negeri, baik pria ataupun wanita termasuk kanak- kanak di depan hukum. Upaya kenaikan peranan wanita dalam pembangunan sudah tersirat dalam 5 falsafah dasar bangsa Indonesia ialah Pancasila, dan Undang- Undang Dasar 1945, Pancasila bagaikan metode serta falsafah hidup bangsa Indonesia, tidak membuat perbandingan antara pria serta wanita, yang dinyatakan kalau tiap masyarakat negeri mempunyai status, hak, serta kewajiban, dan peluang yang sama di dalam keluarga dan warga.

Pada perkembangannya, dalam kehidupan bermasyarakat masih saja ditemukan bermacam wujud aksi maupun keadaan yang mendiskriminasikan salah satu pihak. Contohnya dibidang pendidikan masih banyak wanita yang putus sekolah dari pada pria. Alibi pendukung dari keadaan tersebut merupakan anggapan yang tumbuh di tengah- tengah masyarakat kalau wanita tidak butuh mengenyam pembelajaran yang lebih baik daripada pria, sebab kalangan wanita hanya hendak bekerja mengurus rumah tangga yang dikira tidak memerlukan kecerdasan berpikir.

Yang dimaksud dengan Gender adalah perbedaan peran, sifat, atribut, sikap dan juga perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, gender

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dapat diartikan sebagai peran dan juga perilaku yang terbentuk oleh masyarakat dengan proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. (KPPPA, 4 : 2019) adanya ketimpangan antara perempuan dan laki-laki menimbulkan ketidakadilan yang bisa berpengaruh terhadap kebijakan dan juga kehidupan sosial.

Pengertian kesetaraan gender ini mengarah pada suatu keadaan yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam pemenuhan hak dan kewajiban, atau dapat juga diartikan bahwa kesetaraan gender mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab dan juga kesempatan antara laki-laki dan perempuan. (KPPPA, 4 : 2019)

Secara legal berdasarkan hukum pelaksanaan kesetaraan gender harus wajib dilakukan karena telah tertuang dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Inpres ini menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, sampai kepada Bupati ataupun Walikota untuk melaksanakan dan menerapkan pengarusutamaan gender agar terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantapan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender yang sesuai dengan bidang, tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Pengarusutamaan Gender (PUG) jadi suatu strategi yang dibentuk dengan ikhtiad supaya terintegrasinya perspektif gender jadi satu ukuran integral dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perencanaan, penataan, penerapan, pemantauan serta penilaian dari seluruh kebijakan dan program pembangunan. Dengan diintegrasikannya PUG dalam siklus perencanaan serta penganggaran baik di tingkatan pusat ataupun wilayah dengan harapan supaya bisa mendesak alokasi sumber energi pembangunan sehingga jadi lebih efisien, bertanggung jawab, dan adil dalam pemberian khasiat pembangunan untuk penduduk Indonesia secara menyeluruh, baik wanita ataupun pria.

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kota Dumai Pengarusutamaan gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program Pembangunan Daerah.

Kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan menimbulkan konsep yang disebut dengan gender. Dalam mewujudkan kesetaraan gender, tentunya akan ditemui bermacam kondisi yang menjadi pendorong dan juga penghambat keberhasilan pencapaian kesetaraan gender tersebut. Salah satu tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender terkait dengan proses perumusan kebijakan publik yang tentunya akan berdampak dalam aplikasinya dalam masyarakat. (Rahayu, 2016 : 94)

Dilihat dari latar balik historisnya, konsep kesetaraan gender bagi Rowbotham sesungguhnya lahir dari pemberontakan kalangan wanita di negara- negara barat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

akibat penindasan yang dirasakan mereka sepanjang berabad-abad lamanya. Semenjak era Yunani, Romawi, Abad Pertengahan (*the Middle Ages*), serta apalagi pada “abad pencerahan” sekali juga, barat menyangka perempuan bagaikan makhluk inferior, manusia yang cacat, serta sumber dari seluruh kejahatan ataupun dosa.

Perihal ini juga setelah itu menimbulkan gerakan wanita barat menuntut hak serta kesetaraan wanita dalam bidang ekonomi serta politik yang pada kesimpulannya diketahui dengan istilah feminis. Kelahiran “feminisme” dipecah jadi 3 gelombang, yakni feminisme gelombang pertama yang dimulai dari publikasi Mary Wollstonecraft berjudul “*Vindication of the Rights of Women*” pada tahun 1792, yang menganggap kerusakan psikologis dan ekonomi yang dialami perempuan disebabkan oleh ketergantungan ekonomi pada laki-laki dan peminggiran perempuan dari ruang publik. (Gusmansyah : 2019)

Sehabis itu, timbul feminisme gelombang kedua dengan doktrinnya yang memandang perbandingan gender terencana diciptakan buat menguatkan penindasan terhadap wanita. Pada gelombang kedua inilah dimulai gugatan perempuan terhadap institusi pernikahan, keibuan (*motherhood*), hubungan lawan jenis (*heterosexual relationship*) dan secara radikal mereka berusaha mengubah setiap aspek dari kehidupan pribadi dan politik. Terakhir adalah feminisme gelombang ketiga yang lebih menekankan kepada keragaman (*diversity*), sebagai contoh ketertindasan kaum perempuan heteroseksual yang dianggap berbeda dengan ketertindasan yang dialami kaum lesbi dan sebagainya. (Gusmansyah : 2019)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks di Indonesia, kesetaraan gender memanglah telah menampilkan kenaikan. Tetapi kesenjangan antara pria serta wanita masih senantiasa nampak. Misalnya, perbandingan pemasukan antara pria serta wanita, partisipasi dalam dunia kerja, angka partisipasi murni (APM) dalam pembelajaran, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia angka melek huruf penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kelamin pada tahun 2020 yaitu pada laki-laki 97.45% pada perempuan 94,55%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak laki-laki yang melek huruf atau bisa membaca di bandingkan dengan perempuan di indonesia.

Berdasarkan data kependudukan kota Dumai Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kota Dumai pada tahun 2019 yaitu pada laki-laki berjumlah 77,62% dan pada jenis kelamin perempuan yaitu 75,22%. Dan pada usia 19-24 pada laki-laki berjumlah 39,92% dan pada jenis kelamin perempuan yaitu 17,88% Hal ini menunjukkan ketimpangan pada partisipasi sekolah anak di kota Dumai.

Dan juga Angka Melek Huruf (AMH) kelompok umur 15 tahun keatas berdasarkan jenis kelamin di kota Dumai pada tahun 2018 yaitu pada laki-laki berjumlah 97,33 % sedangkan perempuan berjumlah 93,99 %. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak laki-laki yang bisa membaca di bandingkan perempuan di kota Dumai.

Berdasarkan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (I-LPPD) Kota Dumai tahun 2017, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalm Pembangunan Daerah di Kota dumai sudah dilakukan melalui Program dan kegiatan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yaitu, pada Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan Kegiatan perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik. Lalu Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan Kegiatan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak, Kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, Kegiatan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, Kegiatan pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Lalu Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan kegiatan Kegiatan pelaksanaan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan, Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera. Dan juga Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan kegiatan Kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, Kegiatan pengembangan sistem informasi gender dan anak, Kegiatan pembinaan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan PUG.

Kemudian pada tahun 2018 berdasarkan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (I-LPPD) Kota Dumai Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu, Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan Kegiatan perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perempuan di bidang politik dan jabatan publik. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Kegiatan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak Kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Kegiatan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Kegiatan pengembangan sistem informasi gender dan anak Kegiatan pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kegiatan pelaksanaan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak

Lalu Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan Kegiatan pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT Kegiatan workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga Kegiatan pencegahan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.

Kota Dumai ialah salah satu kota di Provinsi Riau dengan jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 sebanyak 255. 096 jiwa serta luas daerah seluas 1, 727. 38 km² sehingga kepadatan penduduk di Kota Dumai tahun 2010 ialah 148 jiwa per km². Dengan laju perkembangan penduduk dari tahun 2010 hingga 2018 sebesar 2, 74 persen, jumlah penduduk Kota Dumai pada tahun 2018 sebanyak 303. 292 jiwa. Jumlah penduduk pria sebanyak 155. 638 jiwa serta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk wanita sebanyak 147. 654 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebanyak 176 jiwa per km². Jumlah tersebut menunjukkan terdapat perbedaan yang tidak terlalu jauh antara jumlah penduduk pria dengan penduduk wanita.

Dan juga, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Dumai tiap tahunnya terus meningkat padahal kota Dumai pada tahun 2017 mendapatkan penghargaan sebagai kota anak layak di kategori kota madya sejak tahun 2016. Tercatat pada kasus pencabulan pada tahun 2019 mengalami peningkatan, pada tahun 2018 terdapat 7 kasus pencabulan dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 18 kasus. Dan untuk kasus pencabulan anak dibawah umur pada tahun 2018 terdapat 25 kasus, pada tahun 2019 meningkat menjadi 31 kasus. Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tercatat terdapat 12 kasus, pada tahun 2019 terdapat 14 kasus KDRT. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Dumai terbilang cukup tinggi.

Kesetaraan gender dapat ini bisa dicapai dengan cara mengurangi kesenjangan yang terjadi antara penduduk perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan mengontrol sumber daya dan juga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan dalam proses pembangunan, serta dapat merasakan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan. (KPPPA, 3 : 2019)

Indeks Pembangunan Gender dapat di pengaruhi oleh beberapa komponen, yaitu : 1) Angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, Kota Dumai : laki-laki 68,81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tahun dan perempuan 72,73 tahun. 2) Sumbangan Pendapatan laki-laki dan perempuan dilihat dari angkatan kerja dan upah yang diterima. Tingkat partisipasi angkatan kerja kota Dumai laki-laki 80,20% dan perempuan 47,21% . rendahnya angka angkatan kerja perempuan tentunya sangat berpengaruh terhadap sumbangan pendapatan bagi perempuan. Dan juga jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Dumai pada tahun 2018 laki-laki sebanyak 1.396 dan perempuan 2.612 jiwa. Dan jumlah Anggota DPRD Kota Dumai dari Komisi I sampai komisi III yaitu laki-laki 26 orang dan perempuan 4 orang.

Dari angka indeks pembangunan Gender kota dumai diatas terlihat terdapat perbedaan angka pada laki-laki dan perempuan, yang paling besar perbedaanya yaitu pada tingkat partisipasi angkatan kerja, dimana laki-laki lebih tinggi tingkat partisipasi angkatan kerjanya dari pada perempuan. Maka dari itu penulis tertarik melakan penelittian mengenai implementasi peraturan pengarusutamaan gender di Kota Dumai. penelitian ini penting untuk dilakukan karena kebijakan pengarusutaan Gender adalah upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah dengan berkeadilan gender tanpa adanya diskriminasi.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis melakukan melakukan penelitian mengenai Implementasi peraturan pengarusutamaan gender di kota dumai dengan judul : **Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Dikota Dumai**

1.2 Perumusan Masalah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada latar belakang diatas, maka penulis dalam penelitian merumuskan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apa kebijakan pemerintah kota Dumai dalam mewujudkan kesetaraan gender di kota Dumai
2. Bagaimana pelaksanaan pengarusutamaan gender di kota Dumai
3. Bagaimana peran pemerintah kota Dumai dalam kesetaraan gender di kota Dumai
4. Apa kendala pemerintah kota Dumai dalam mewujudkan kesetaraan gender

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di kota Dumai

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan pada penelitian ini adalah :

1. Menambah wawasan keilmuan peneliti mengenai kesetaraan Gender
2. Menjadi referensi dan sumber informasi mengenai pelaksanaan kesetaraan gender
3. Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah terkait mengenai pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada BAB ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan, Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan, Pengarusutamaan Gender, Pembangunan Daerah, Pandangan Islam Terhadap Pengarusutamaan Gender, penelitian terdahulu, definisi konsep dan konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

BAB ini berisikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik dan pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada BAB ini penulis mengemukakan tentang sejarah singkat Kota Dumai

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup apa saja kebijakan dan bagaimana Implementasi kebijakan pemerintah kota Dumai dalam mewujudkan kesetaraan gender dikota Dumai.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

BAB ini merupakan BAB penutup yang menguraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Implementasi Kebijakan

Solichin dalam (NURLIAH, 2015 : 7) Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi pada prinsipnya merupakan tahap dalam merealisasikan tujuan dari sebuah kebijakan. Dalam arti luas Solichin mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai “bentuk pengoprasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (stakeholder), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, teknik secara sinergitas yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan ke arah tertentu yang dikehendaki.

Kebijakan atau Policy pada umumnya dipahami sebagai keputusan yang ditetapkan atau diambil guna menangani hal-hal tertentu. Tetapi kebijakan bukan hanya sekedar suatu keputusan yang ditetapkan. Menurut Anderson (1994) Kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan yang bertujuan, yang kemudian diikuti oleh seseorang atau kelompok yang berkenaan dengan suatu masalah tertentu. (Muchlis Hamdi, 36 : 2015)

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan berhubungan dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari kebijakan tersebut, dalam tahap ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintahan bekerja dan bagaimana proses yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan kebijakan dapat menghasilkan suatu keadaan yang direncanakan. (Muchlis Hamdi, 97 : 2015)

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin dapat dibedakan dalam tiga tingkatan: Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. (Taufiqurokhman, 2014)

Implementasi merupakan bentuk pengoperasionalisasian aktivitas yang sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan kemudian menjadi kesepakatan bersama antara berbagai *stakeholders* yang digerakkan untuk bekerjasama untuk menerapkan kebijakan pada arah tertentu yang di kehendaki. Dengan demikian, sasaran dan tujuan kebijakan atau program itu secara keseluruhan dapat diraih dengan hasil yang memuaskan. (Solichin , 133 : 2014)

Berdasarkan atas paparan di atas, bisa dilihat kalau implementasi kebijakan tidaklah suatu yang pendek serta simpel, tetapi sangat lingkungan serta rumit dimana meliputi sebagian tahapan proses kebijakan.

2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Keberhasilan sesuatu implementasi kebijakan ditetapkan oleh beberapa aspek yang menunjang dalam proses implementasi kebijakan yang masing-masing mempunyai keterikatan ataupun saling berhubungan. (Riant Nugroho, 226 : 2015) menurut Edward III (1980) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, diuraikan di bawah ini :

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan bagaimana kebijakan itu dapat dikomunikasikan kepada publik agar memperoleh respons dari berbagai pihak-pihak yang terlibat. Supaya penerapan kebijakan bisa dicoba dengan baik, hingga pengambil keputusan wajib berbicara efisien dengan para implementor. (Riant Nugroho, 226 : 2015)

2) Sumber-sumber daya

Jika isi dari kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, namun apabila implementor atau pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersebut, maka Implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan dengan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan juga sumber daya finansial. Sumber daya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan agar dapat berjalan efektif. Tanpa adanya sumberdaya, kebijakan tidak dapat berjalan dan hanya tinggal dikertas berupa dokumen saja. (Subarsono, 91 : 2016)

Implementasi akan tidak efektif, kalau sumber-sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan kurang memadai. Sumber-sumber daya ini dapat berupa, antara lain kualitas sumber daya manusia (staf), informasi, kewenangan, dan fasilitas-fasilitas lainnya.

3) Disposisi (Sikap)

Disposisi adalah sikap dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti kejujuran, komitmen dan sifat demokratis. apabila implementor atau pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik pula, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Namun sebaliknya, jika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif. (Subarsono, 91-92 : 2016)

4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan berpengaruh sangat signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek dari struktur organisasi yang memiliki peran penting dari setiap organisasi yaitu prosedur operasi yang standar atau standar operasional prosedur (SOP). SOP menjadi menjadi pedoman bagi setiap pelaksana kebijakan dalam bertindak. (Subarsono, 92 : 2016)

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Chazali, 2016) implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini sebenarnya akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pejabat-pejabat tinggi (atasan) untuk mendorong pelaksana (pejabat-pejabat bawahan) bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan. Para pejabat dalam organisasi mempunyai pengaruh oleh karena posisi hierarkis mereka.

Para pejabat dalam struktur organisasi mempunyai kekuasaan personil yang diukur dari: 1) Rekrutmen dan seleksi, 2) penugasan dan relokasi, 3) kenaikan pangkat dan 4) akhirnya pemecatan. Di samping itu, mereka mempunyai kontrol atas alokasi anggaran belanja pada biro-biro pemerintah dan kantor-kantor daerah yang dapat mereka tingkatkan atau kurangi. Mereka juga mempunyai kewenangan untuk menanggapi pencapaian kebijakan yang memuaskan atau tidak memuaskan. Selain itu juga, para pejabat-pejabat ini mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku bawahan. (Chazali, 2016)

2.3 Pengarusutamaan gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan suatu strategi untuk mencapai suatu keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan juga program yang memperhatikan aspirasi, kebutuhan, pengalaman, dan permasalahan laki-laki dan perempuan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. (Ni Made, 36-37 : 2017)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan Inpres No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional, Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibentuk buat mengintegrasikan gender jadi satu ukuran integral dari perencanaan, penyusunan, penerapan, pemantauan serta penilaian atas kebijakan serta program pembangunan nasional.

Menurut Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kota Dumai, Pengarusutamaan gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program Pembangunan Daerah.

Kebijakan pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk menjamin bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari seluruh kebijakan program dan proyek diseluruh sektor pembangunan telah memperhitungkan dimensi dan aspek gender yaitu laki-laki dan perempuan sebagai pelaku atau objek dan subjek yang setara dalam akses, partisipasi dan kontrol atas pembangunan serta dalam memanfaatkan hasil pembangunan. (Nurhayati, 2019:56)

Istilah gender juga dipahami secara berbeda-beda oleh masyarakat. Pada dasarnya, gender adalah salah satu konsep sosial yang dikonstruksikan seiring dengan berkembangnya persoalan sosial yang terkait dengan relasi antara laki-laki dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perempuan dalam ruang lingkup budaya, tradisi, norma, dan pemahaman dari suatu agama. (Nurhayati, 2019:55) Menurut Mansour Fakih dalam (Nurhayati, 2019:55) Terdapat tiga paham untuk bisa memahami teori gender yaitu nature (konstruksi budaya), nature (secara alamiah) dan equilibrium (keseimbangan atau kemitraan).

Kesetaraan Gender (Gender Equality) adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati pembangunan tersebut. (Wewen, 2016:96) Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. (Wewen, 2016:96)

Tujuan Pengarusutamaan Gender adalah berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kota Dumai,yaitu :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah.

- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara.
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender.
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan.
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kota Dumai, Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender, Walikota menetapkan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Dumai sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau

Daerah Di Kota Dumai. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kota Dumai lembaga pemerintah daerah yang ditetapkan:

- a. mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender.
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi advokasidan sosialisasi tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan pengarusutamaan gender.

2.4 Pembangunan

Menurut Todaro dalam (Mukmin, 2017:1) Pembangunan dibagi dalam tiga komponen dasar, sebagai basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami pembangunan yang paling hakiki yakni kecukupan yang mmenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan rasa harga diri atau jati diri serta kebebasan dalam memilih selanjutnya Todaro mengemukakan bahwa pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai hal yang mendasar atas struktur sosial sikap-sikap masyarakat, dan institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, pengentasan kemiskinan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Siagian dalam (Mukmin, 2017:2) Pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara atau bangsa yang menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).

Dengan terdapatnya otonomi Daerah, kesempatan untuk tiap daerah buat meningkatkan daerahnya masing-masing terus menjadi besar. Penerapan otonomi daerah tidak hanya bersumber pada pada ketentuan hukum, pula bagaikan pelaksanaan tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan metode membagikan wilayah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata serta bertanggung jawab.

Pembangunan membutuhkan perencanaan sebab kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber energi yang ada. Lewat perencanaan akan diformulasikan aktivitas pembangunan yang secara efektif serta efisien bisa memberikan hasil yang maksimal dalam menggunakan sumber energi yang ada serta meningkatkan kemampuan yang terdapat. Pemanfaatan terhadap bermacam sumberdaya baik sumberdaya alam, modal serta sumberdaya manusia memerlukan perencanaan yang baik sehingga nantinya bisa dikelola secara baik buat menunjang penerapan pembangunan. Hingga dibutuhkanlah perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan wilayah mengingat sudah digulirkannya desentralisasi serta otonomi wilayah dengan timbulnya Undang- Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Wilayah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Dengan lakukannya pembangunan daerah diharapkan pembangunan daerah ialah bagian internal serta integral dari pembangunan nasional, bila pembangunan daerah kandas dalam penerapan pembangunan hingga dapat dikatakan pembangunan nasional pula tidak sukses. Tetapi wajib senantiasa dicermati buat tercapainya keberhasilan pembangunan sesuatu daerah wajib betul- betul mencermati kebutuhan, keadaan serta kemampuan yang dipunyai. Perbandingan keadaan wilayah hendak menyebabkan warna pembangunan yang diterapkan berbeda pula. Kebijakan yang diterapkan serta sukses pada sesuatu daerah belum pasti membagikan hasil yang sama untuk daerah yang lain.

2.5 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

Pelaksanaan Pengarusutamaan gender dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan. Dan juga memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengarusutamaan gender dalam pembangunan Daerah sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kota Dumai, yaitu :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Walikota adalah penanggungjawab umum pelaksanaanPengarusutamaan Gender di daerah.
 2. Tanggung jawab Walikota dapat dilimpahkan kepada Wakil Walikota.
 3. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender, Walikota menetapkan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah.
 4. Dalam rangka percepatan melembaganya pengarusutamaan gender di seluruh instansi dan Lembaga Pemerintah Daerah dibentuk Pokja PUG dan Fokal Point Pengarusutamaan Gender atau gugus tugas atau sebutan lain yang sejenis.
 5. Walikota menetapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Sekretaris Pokja PUG di daerah.
- Lembaga Non Pemerintah juga berhak ikut serta dalam pengarusutamaan gender meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah. Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan Pengarusutamaan Gender dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. kemudian Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, berhak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengarusutamaan gender.

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Beban Daerah. Pembiayaan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain dari APBD Kota dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.6 Tantangan Dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender

Fenomena masih terjadinya ketidaksetaraan gender seringkali disebabkan masih adanya budaya patriarki yang dianut oleh sebagian besar bangsa-bangsa yang ada di dunia. Pandangan bahwa laki-laki lebih perkasa, lebih berhak menduduki peran-peran penting. Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Mewujudkan kesetaraan gender merupakan agenda jangka panjang yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, karena merubah budayayang diawali dari perubahan mental dalam memandang sesuatu akan sangat membutuhkan waktu. (Nanang, 2015 : 121)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketertinggalan wanita mencerminkan masih terdapatnya ketidakadilan serta ketidaksetaraan antara pria serta wanita di Indonesia, perihal ini bisa nampak dari cerminan keadaan wanita di Indonesia. Perbandingan gender dengan pemilahan sifat, kedudukan, serta posisi tidak jadi permasalahan sejauh tidak melahirkan ketidakadilan, namun Kenya- taannya perbandingan gender sudah melahirkan bermacam ketidakadilan, bukan saja untuk kalangan wanita, namun pula untuk kalangan laki- laki

Pembedaan kedudukan, fungsi, tugas serta tanggung jawab dan peran antara laki- laki serta wanita baik secara langsung ataupun tidak langsung, dan akibat suatu peraturan perundang- undangan ataupun kebijakan sudah memunculkan bermacam ketidakadilan sebab sudah berakar dalam adat, norma maupun struktur masyarakat. Gender masih dimaksud oleh masyarakat sebagai perbandingan jenis kelamin. Masyarakat belum menguasai kalau gender merupakan sesuatu konstruksi budaya tentang kedudukan guna serta tanggung jawab sosial antara pria serta wanita. Keadaan demikian menyebabkan kesenjangan kedudukan sosial serta tanggung jawab sehingga terjalin diskriminasi, terhadap pria serta wanita. Hanya saja apabila dibandingkan, diskriminasi terhadap wanita kurang menguntungkan dibanding pria.

Upaya mewujudkan kesetaraan gender tidak boleh juga diartikan sebagai upaya untuk menyamakan secara sporadis antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan ini bukan dengan memberi perlakuan sama pada setiap individu agar kebutuhannya yang spesifik dapat terpenuhi, konsep ini disebut kesetaraan kontekstual artinya

kesetaraan bukan kesamaan matematis, melainkan lebih kepada kesetaraan yang adil yang sesuai dengan konteks masing-masing. (Nanang, 2015 : 128)

Tantangan yang dihadapi sejalan dengan era desentralisasi, yaitu timbulnya masalah kelembagaan dan jaringan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), terutama yang menangani masalah-masalah pemberdayaan perempuan dan anak. Program-program pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak merupakan program lintas bidang dan lintas program, sehingga diperlukan koordinasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Sistem pemerintahan serta lembaga-lembaga dari tingkat pusat hingga daerah yang belum sepenuhnya responsif gender dapat meminggirkan perempuan secara sistematis melalui kebijakan dan program. Data statistik yang menjadi basis pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan dan program tidak mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan dan laki-laki sehingga kebijakan, program, dan lembaga yang dirancang menjadi netral gender dan menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan. Disamping itu, terbatasnya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, mengakibatkan kesulitan dalam menemukan masalah-masalah gender yang ada. (DPPPA Kota Dumai, 2019)

Karena kesetaraan dan keadilan gender belum mencapai tahapan yang diharapkan semua pihak, Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan yang secara garis besar terkait dengan urusan wajib Pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Dengan mengacu pada regulasi tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan data gender dan anak yang bersifat lokal sehingga kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan bisa terwujud. (DPPPA Kota Dumai, 2019)

Selain itu juga pada daerah pelosok pedesaan yang masih sangat mendominasi budaya Patriaki dan tingkat pendidikan yang rendah dan minim informasi salah satu akibat dari kurangnya pemahaman gender mengakibatkan timbulnya tindakan pelecehan dan bahkan kekerasan yang sering dialami oleh kaum perempuan.

Ada pula tantangan yang dihadapi dalam pencapaian gender di Indonesia, yaitu :

1. pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan di pusat dan di daerah dalam pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan
2. kelembagaan pengarusutamaan gender di pusat dan daerah belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

Namun pencapaian kesetaraan gender Indonesia memiliki peluang sangat besar yang didukung dengan berbagai kebijakan yang berfokus pada pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan, pembangunan kesehatan, dan pendidikan. Pencapaian kesetaraan gender di Indonesia juga didukung dengan adanya peluang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kerja sama internasional baik antar negara maupun dengan lembaga internasional melalui PBB dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. (KPPPA, 2018)

2.7 Pandangan Islam Terhadap Kesenjangan Gender

Terkait dengan pengarusutamaan gender dalam pandangan islam yaitu islam secara umum dalam islam tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan dalam hakekat kemanusiaan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wata'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, yaitu:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Di dalam Islam, prinsip-prinsip dasar menimpa kemanusiaan serta hak asasi wanita dan peluang yang sama buat mengabdikan telah jelas serta tegas. Meski terdapat perbandingan biologis yang alamiah tidak jadi hambatan buat memperoleh hak yang sama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah Subhanahu Wata'ala diciptakan adalah untuk menyembah Allah Subhanahu Wata'ala tidak ada perbedaan didalamnya, sebagaimana dalam surah Az-Zariyat ayat 56, yaitu :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.

Kekhususan yang diberikan Allah Subhanahu Wata'ala kepada laki-laki yaitu karena dalam islam laki-laki merupakan pelindung bagi kaum wanita, namun hal ini tidak membuat laki-laki menjadi kaum yang lebih mulia disisi Allah Subhanahu Wata'ala. Kelebihan tersebut diberikan kepada pria dalam kapasitasnya bagaikan Kekhususan yang diberikan Allah kepada pria, sebab pria merupakan pelindung untuk wanita, seluruh ini bukanlah menimbulkan pria jadi hamba yang utama di sisi anggota warga yang mempunyai kedudukan sosial serta publik lebih dari wanita. Dalam kapasitasnya bagaikan hamba, pria serta wanita tiap- tiap memperoleh penghargaan dari Tuhan cocok dengan kandungan pengabdianya.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.9 Penelitian Terdahulu

| No. | Penulis | Judul | Metode | Kesimpulan |
|-----|---------------|------------------------|------------|---|
| 1. | Nurhayati dan | Implementasi Peraturan | Kualitatif | Komunikasi sangat menentukan keberhasilan |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|----------------|--|------------|---|
| Muhammad Yasir | Walikota Batam No 7 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Kota Batam Tahun 2016 | | pencapaian tujuan dari implementasi Peraturan Walikota No.7 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender di Kota Batam Tahun 2014. Komunikasi yang dilakukan adalah berupa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Batam kepada seluruh SKPD yang ada di Kota Batam, sosialisasi yang dilakukan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan yang menghalanginya dan semua yang hadir dalam sosialisasi itu memahami dan mendukung sepenuhnya penerapan dari Peraturan wali Kota Batam No.7 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender. |
| 2. Andi Inar | Implementasi | Kualitatif | Faktor-faktor penyebab |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|------------------------|--|------------|---|
| Sahabat | Pengarusutaman Gender Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Di Provinsi Gorontalo) | | tidak terintegrasinya Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan di Provinsi Gorontalo yaitu kebijakan/peraturan di daerah terkait pengarusutamaan gender (PUG) tidak dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada, tidak diterapkannya analisis gender dalam perencanaan pembangunan daerah, belum terbentuk Kelompok Kerja (POKJA) PUG, dan ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin di semua instansi pemerintah daerah masih terbatas. |
| 3. Wewen Kusumi Rahayu | Analisis Pengarusutaman Gender dalam Kebijakan | Kualitatif | Badan Pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | Publik studi kasus di BPPPAKB Provinsi Jawa Tengah | | Provinsi Jawa tengah menggunakan GAP atau gebder Analysis Pathway untuk wewujudkan kesetaraan kesetaraan gender di provinsi Jawa tengah. GAP ini dikeluarkan atau dibuat oleh Bappenas untuk menjadi acuan pemerintah dalam menyusun program kerja dan kegiatan. |
|--|--|--|--|--|

2.9 Defenisi Konsep

Defenisi konsep dimaksudkan untuk mengetahui batasan-batasan yang jelas dari konsep-konsep yang akan di teliti, maka adapun defenisi konsep pada penelitian ini yaitu :

1. Solichin dalam (NURLIAH, 2015 : 7) Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi pada prinsipnya merupakan tahap dalam merealisasikan tujuan dari sebuah kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menurut Anderson (1994) dalam (Muchlis Hamdi, 36 : 2015) Kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan yang bertujuan, yang kemudian diikuti oleh seseorang atau kelompok yang berkenaan dengan suatu masalah tertentu.
3. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan suatu strategi untuk mencapai suatu keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan juga program yang memperhatikan aspirasi, kebutuhan, pengalaman, dan permasalahan laki-laki dan perempuan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. (Ni Made, 2017 : 36-37)
4. Kesetaraan Gender (Gender Equality) adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati pembangunan tersebut. (Wewen, 2016:96)
5. Menurut Siagian dalam (Mukmin, 2017:2) Pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara atau bangsa yang menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).

2.10 Operasional Konsep

Tabel 2.10 Operasional Konsep

| Konsep/Referensi | Indikator | Sub Indikator |
|---|------------------------|--|
| Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. (George C. Edward III) | a. Komunikasi | a. Penyaluran b. Konsistensi c. Kejelasan |
| | b. Sumber Daya | a. Kecukupan b. Kewenangan c. Informasi d. Sarana dan prasarana |
| | c. Disposisi (Sikap) | Sikap dari pelaksana kebijakan yang mendukung suatu kebijakan yang telah ditetapkan. |
| | d. Struktur Organisasi | a. Standar Operasional Prosedur (SOP) b. Fragmentasi |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

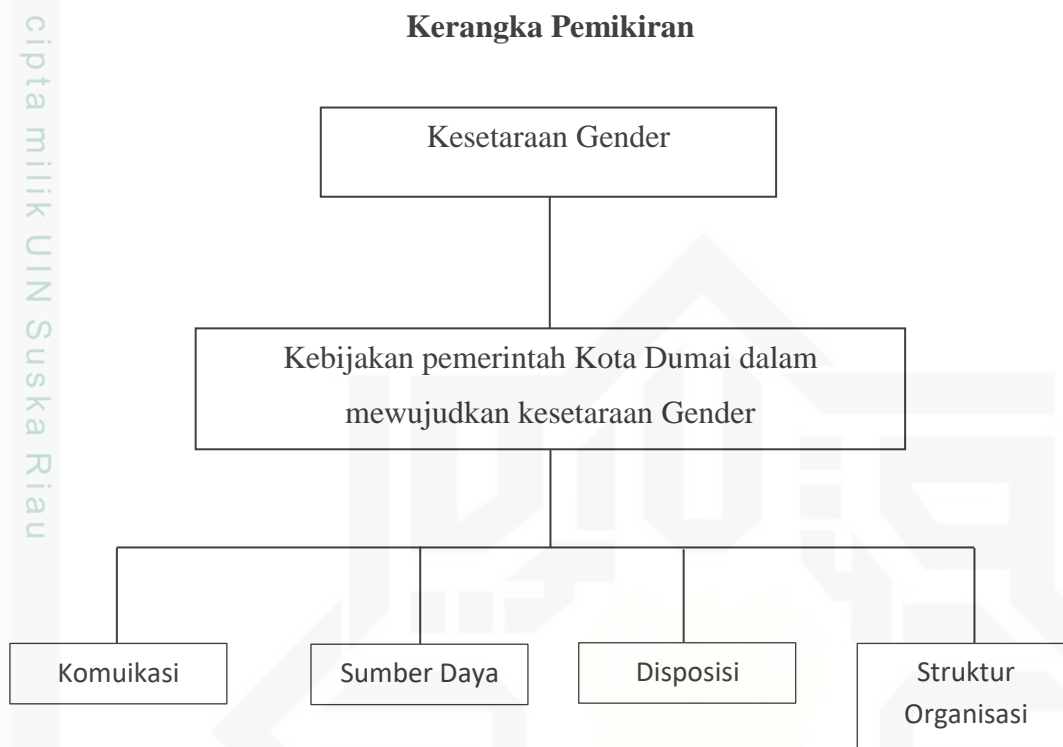
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU

2.11 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Provinsi Riau, Penelitian ini dilakukan mulai dari Desember 2020 sampai dengan April 2021

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat suatu permasalahan untuk penelitian generalisasi. (Sandu siyoto, 2015)

3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dalam penelitian yang didapat dengan cara melakukan tanya jawab dan pengamatan secara langsung atau wawancara dan diperoleh melalui pertanyaan-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dipersiapkan peneliti. (Khodijah, 2019)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis, foto-foto, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. (Sandu siyoto, 2015) Disini peneliti memperoleh sumber data sekunder yang berasal dari situs-situs resmi pemerintahan Kota Dumai.

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang. Kegunaan informan bagi peneliti ialah membantu agar dalam waktu relatif singkat banyak informasi yang terjaring. Informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lain. (Sandu siyoto, 2015)

Tabel 3.1 Informan Penelitian

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|------------------------|--|
| 1. | Sri Triani Indari, SKM | Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga Dinas Pemberdayaan |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|----|-------------------------|---|
| | | Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai |
| 2. | Dewi Yasmanidar, SKM | Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ketahanan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai. |
| 3. | Wahyu Ratna, SKM, M.Kes | kepala Unit Pelaksana Teknid Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kota Dumai. |

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Haris Herdiansyah, 29 : 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini dilakukan kepada Informan yang berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai mulai dari staf sampai ke kepala bidang pada DPPPAA.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, dan foto-foto. (Sudaryono, 219 : 2017)

Dalam penelitian ini dokumentasi diambil dari peraturan-peraturan yang ada, kemudian dari buku-buku, dan juga dari hasil laporan kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPAA) kota Dumai.

c. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui proses mengamati subjek penelitian beserta lingkungannya dan melakukan proses perekaman maupun pemotretan atas perilaku yang diamati tanpa mengubah kondisi alamiah subjek dengan lingkungannya. (Haris Herdiansyah, 130 : 2015)

Observasi dilakukan langsung ke kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPAA) kota Dumai dan juga Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Dumai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3.5 Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono dalam (Anastria, 2018), Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, menurut Sugiyono (2015 : 338-345) ada tiga komponen pokok dalam analisis data, yakni:

a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti Merangkum, Memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b) *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, Pie Chart, Pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c) *Conclusion Drawing/Verification* atau Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar/ kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Dumai

Nama Dumai bagi cerita rakyat tentang Puteri 7, berasal dari kata di lubuk serta umai(sejenis hewan landak) yang mendiami lubuk tersebut. Karena sering diucapkan dengan cepat, lama kelamaan kata tersebut bertaut jadi d'umai serta berikutnya jadi dumai. Pada masa tahun 1930-an, Dumai ialah merupakan dusun nelayan kecil yang terdiri atas sebagian rumah nelayan. Penduduknya meningkat pada saat Jepang mendatangkan kalangan romusha(pekerja paksa jaman penjajahan Jepang) dari Jawa. Bersamaan pergantian waktu, terjalin pergantian status Dumai bagaikan berikut:

1. Pada tahun 1945 - 1959, status Dumai tercatat sebagai sebuah desa.
2. Pada tahun 1959 - 1963, Dumai termasuk kedalam wilayah Kecamatan Rupat.
3. Pada tahun 1963 - 1964, Dumai berpisah dari Kecamatan Rupat kemudian berubah status menjadi kawedanan.
4. Kemudian Berdasarkan PP No.8 Tahun 1979 tertanggal 11 April 1979, Dumai telah berubah status menjadi Kota Administratif yang merupakan kota administratif pertama di Sumatera dan ke-11 di Indonesia yang berada di bawah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Lalu Berdasarkan UU No.16 Tahun 1999 tertanggal 20 April 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3829), Dumai kemudian berubah status menjadi Kota madya sehingga menjadi Kota madya Daerah tingkat II Dumai. Seiring dengan perkembangan politik di Indonesia, berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 maka dari itu Kota madya Dumai berubah menjadi Kota Dumai. Masa jabatan Walikota Dumai pertama mulai dari tanggal 27 April 1999 hingga tanggal 27 April kemudian dijadikan hari ulang tahun Kota Dumai.

Filosofi dasar atas kenaikan status Dumai dalam pengelolaan daerah administrasi pemerintahan merupakan buat pemperpendek rentang kendali, memesatkan tingkatan pelayanan serta memperbesar kedudukan warga dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan serta pemberdayaan warga, disamping menangkap kesempatan pengembangan ekonomi.

Kota Dumai ialah salah satu Kota di Propinsi Riau, dengan nama ibukota ialah Dumai. Kota Dumai terletak di pesisir tepi laut pulau Sumatera sebelah timur. Daerah Dumai terletak pada posisi antara 1010. 23". 37'- 1010. 8". 13' bujur timur serta 10. 23". 23'- 10. 24". 23' lintang utara. Berdasar posisi ini, zona waktu Dumai merupakan UTC+7. Dumai mempunyai luas daerah 1. 727. 38 Km2. Batas- batas daerah Kota Dumai berdekatan dengan daerah bagaikan berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Rupat.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandau serta Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih serta Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.

Udara di Dumai merupakan udara tropis dengan 2 masa ialah masa hujan serta masa kemarau. Temperatur udaranya rata- rata antara 21- 35 0C serta rerata curah hujan antara 100- 300 milimeter.

Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah di bagian utara serta di sebelah selatan sebagian merupakan dataran besar. Keadaan tanahnya kebanyakan berbentuk tanah rawa yang bergambut dengan kedalaman antara 0- 0, 5 meter. Struktur tanah biasanya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan endapan, alluvial serta tanah organosol serta gley humus dalam wujud rawa-rawa ataupun tanah basah.

Di Dumai Terdapat 15 sungai, yang mana Sungai- sungai tersebut bisa dilayari kapal pompong, sampan serta perahu hingga jauh ke hulu sungai. Sungai- sungai tersebut merupakan sungai:

1. Buluala(40 Kilometer.)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Geniut(12 Kilometer.)
3. Kepala Beruang(5 Kilometer.)
4. Kemeh(10 Kilometer.)
5. Mampu(13 Kilometer.)
6. Merambung(7 Kilometer.)
7. Mesjid(29 Kilometer.)
8. Nerbit(12 Kilometer.)
9. Pelintung(8, 5 Kilometer.)
10. Santaulu(22 Kilometer.)
11. Selinsing(4 Kilometer.)
12. Senepis(35 Kilometer.)
13. Tanjung Leban(3 Kilometer.)
14. Teluk Dalam(10 Kilometer.)
15. Teras(10 Kilometer.)

Kota Dumai memiliki visi dan misi, yaitu visi kota dumai adalah :

" Terwujudnya masyarakat dumai yang makmur dan madani pada tahun 2021 "

Kemudian demi mewujudkan Visi Pembangunan Kota Dumai tersebut dan juga berdasarkan komitmen Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai sudah dirumuskan pula Misi Pembangunan Kota Dumai yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan air minum yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDm yang berdaya saing
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat dalam pemberantasan kemiskinan
4. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan
5. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan perikanan serta ketahanan pangan
6. Meningkatkan produktifitas sektor jasa, perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah
7. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu
8. Mewujudkan Dumai sebagai *One Stop City* yang berbasis potensi daerah.

Tabel 4.1 Daftar kecamatan dan ibu kota kecamatan beserta luas wilayah masing-masing kecamatan

| No | Kecamatan | Ibu Kota Kecamatan | Luas Total Area (Km ² /sq.km) |
|----|-----------------|--------------------|--|
| 1 | Bukit Kapur | Bukit nenas | 200,00 |
| 2 | Medang Kampai | Teluk Makmur | 373,00 |
| 3 | Sungai Sembilan | Lubuk Gaung | 975,38 |
| 4 | Dumai Barat | Purnama | 44,98 |
| 5 | Dumai Selatan | Bukit Datuk | 73,50 |

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|---|-------------|--------------|-------|
| 6 | Dumai Timur | Teluk Binjai | 47,52 |
| 7 | Dumai Kota | Laksamana | 13,00 |

Sumber : Kota Dumai Dalam Angka 2020

Jumlah penduduk Kota Dumai berdasarkan hasil dari sensus penduduk pada tahun 2010 (SP 2010) sebanyak 253.803 jiwa dan luas wilayah seluas 1.727,38 km² sehingga kepadatan penduduk di Kota Dumai pada tahun 2010 yaitu 147 jiwa per km². Dengan laju pertumbuhan penduduk mulai tahun 2010 sampai 2019 sebesar 2,15 persen, dan jumlah penduduk Kota Dumai pada tahun 2019 sebanyak 308.812 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 158.287 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 150.525 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebanyak 179 jiwa per km². lalu kecamatan dengan penduduk terbanyak tahun 2019 yaitu Dumai Timur dengan total jumlah penduduk 66.435 jiwa (21,51 persen), kemudian sedangkan kecamatan dengan penduduk terendah yaitu Medang Kampai dengan jumlah penduduk 12.351 jiwa (4,00 persen).

4.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kewenangannya.
- c. pimpinan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- d. pengesahan dan penandatanganan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
- e. perekomendasi dan perizinan teknis, serta pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya.
- f. pembinaan pelaksanaan tugas UPT.
- g. pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- h. pengoordinasian dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas.

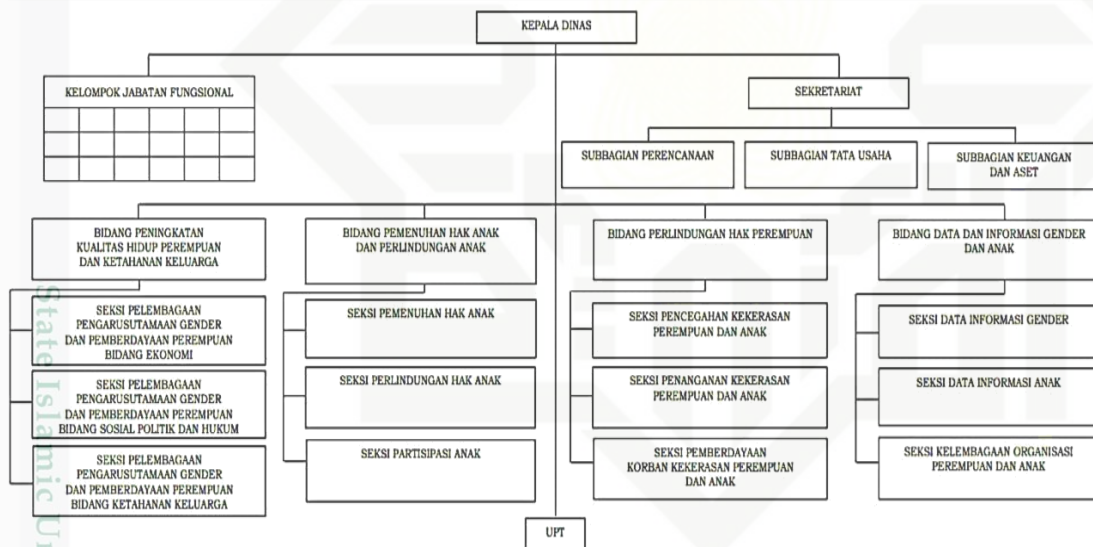


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya.
- j. pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- k. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Dumai terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan
 2. Subbagian Tata Usaha
 3. Subbagian Keuangan dan Aset
- c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga, terdiri dari:
 1. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
 2. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum; dan
 3. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ketahanan Keluarga;
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemenuhan Hak Anak
 - b. Seksi Perlindungan Anak
 - c. Seksi Partisipasi Anak
- d. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, terdiri dari:
 1. Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak
 2. Seksi Penanganan kekerasan Perempuan dan Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Seksi Pemberdayaan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

e. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, terdiri dari:

1. Seksi Data Informasi Gender
2. Seksi Data Informasi Anak
3. Seksi Kelembagaan Organisasi Perempuan dan Anak

f. UPT (Unit Pelaksana Teknis)

g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti buat, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah di kota Dumai sudah dilakukan dengan menggunakan PPRG atau Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, dengan sebanyak 35 perangkat daerah yang sudah menggunakan PPRG dalam menyusun program atau kegiatan yang responsif gender.
2. Setiap kebijakan kesetaraan gender yang disusun oleh pemerintah kota Dumai, semuanya harus menggunakan analisis gender, setiap anggaran yang disusun harus responsif gender, yang artinya setiap dana yang dialokasikan harus dapat menyelesaikan masalah gender. Setiap kebijakan disusun dengan menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) yaitu suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
3. Untuk mewujudkan kesetaraan gender di kota Dumai, pemerintah kota Dumai mengeluarkan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan daerah dan juga peraturan walikota yang telah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis uraikan pada pembahasan di atas. Kemudian terdapat juga beberapa program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah kota Dumai yang dilakukan bersama dengan lembaga masyarakat, mulai dari pemberdayaan masyarakat, pelatihan UMKM pada masyarakat dan juga kegiatan pemberian santunan kepada masyarakat.

4. Pemerintah kota Dumai dalam menjalankan kebijakan kesetaraan gender di dukung dengan sumber daya manusia atau pelaksana kebijakan yang sudah terlatih dan memiliki sertifikat sebagai fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG). Dan juga di dukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD maupun Non APBD. Kemudian setiap pelaksana kebijakan memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam melaksanakan kebijakan kesetaraan gender.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti menarik beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai kesetaraan gender melalui sosialisasi kebijakan-kebijakan yang telah di buat, maupun seminar-seminar kesetaraan gender dan perbanyak program-program yang melibatkan masyarakat langsung mengenai kesetaraan gender di kota Dumai dengan melibatkan seluruh kalangan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulai dari lembaga swadaya masyarakat yang ada, tokoh agama dan para stakeholder yang lainnya.

2. Memberikan arahan dan petunjuk kepada pemerintah desa atau kelurahan tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender atau PUG agar merata di setiap sektor pemerintahan mulai dari lingkup yang kecil sampai ke lingkup yang besar.
3. Memperbanyak relasi dengan pihak-pihak lain seperti perusahaan swasta, karena pemerintah perlu adanya bantuan dari pihak swasta untuk menjalankan kebijakan, terutama untuk mewujudkan kesetaraan gender di kota Dumai.



DAFTAR PUSTAKA

- Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I-LPPD) Kota Dumai Tahun 2017.* (2018). Pemerintah Kota Dumai.
- Data terpilah Gender dan Anak.* (2019). Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai.
- Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (I-LPPD) Kota Dumai Tahun 2017.* (2019). Pemerintah Kota Dumai.
- Kota Dumai Dalam Angka.* (2020). Dumai: Badan Pusat Statistik Kota Dumai.
- Firman, H. A., & Rahmiati. (2020). Pengarusutamaan Gender Dalam Pemerintahan Daerah.
- Gusmansyah, W. (2019). Dinamika Kesetaraan Gender dalam kehidupan Politik Di Indonesia. *Jurnal Hawa*, 157.
- Hamdi, M. (2015). *Kebijakan publik : Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Herdiansyah, H. (2015). *Wawancara. Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, M. (2017). *Perencanaan Pembangunan*. Makasar: CV. Dua Bersaudara.
- Nugroho, R. (2015). *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurhayati, & Yasir, M. (2019). Imolementasi Peraturan Walikota Batam No.07 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender di Kota Batam Tahun 2016. *Jurnal Trias Politika*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahayu, W. K. (2016). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Analisis Kebijakan Publik*.

Rizalul Fikri, R. N. (2015). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Reformasi*.

Situmorang, C. H. (2016). *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Depok: Social Security Development Institute (SSDI).

Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian.

Subarsono. (2016). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitati, Kualitatif, dan R&D.

Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wiasti, N. M. (2017). Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender. *Sunari Penjor*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DUMAI DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI KOTA DUMAI

1. Menurut bapak apa itu kesetaraan gender itu dan seberapa penting kesetaraan gender itu ?
2. Adakah peraturan yang mengatur atau mengawasi kesetaraan gender di kota dumai ?
3. Apa saja kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah kota dumai dalam mewujudkan kesetaraan gender di kota dumai ?
4. Apa peran DPPPA kota dumai dalam mewujudkan kesetaraan gender di kota dumai ?
5. Dalam pembuatan kebijakan apa yang harus di perhatikan demi terwujudnya kesetaraan gender di kota dumai ?
6. Untuk saat ini apa yang menjadi prioritas pemerintah kota dumai dalam mewujudkan kesetaraan gender di kota dumai ?
7. Adakah anggaran khusus untuk kebijakan kesetaraan gender di kota dumai

UIN SUSKA RIAU



Lampiran 2

Bersama Ibuk Sri Triani Indari, SKM sebagai Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai.



kepala Unit Pelaksana Teknid Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kota Dumai Ibuk Wahyu Ratna, SKM, M.Kes



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bersama Pegawai Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai



Salah satu program Dinas PPPA Dumai, Taman Terbuka Ramah Anak (TATERA)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 3

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fckonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/271/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 20 Januari 2021 M
6 Jumadil Akhir 1442 H

Kepada
Yth. **Irdyanti, S.IP, MA**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Dwi Ramadhan
NIM : 11775101416
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Dumai Dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.
Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. Si, Ak, CA
NIP. 19731112 199903 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/285/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 20 Januari 2021 M
6 Jumadil Akhir 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Kota Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Dwi Ramadhan
NIM. : 11775101416
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Dumai Dalam Mewujudkan
Kesetaraan Gender". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/37899
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VI/PP.00.9/285/2021 Tanggal 20 Januari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

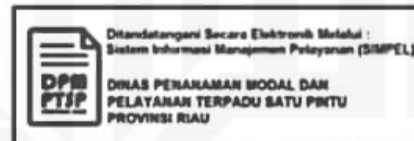
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | DWI RAMADHAN |
| 2. NIM / KTP | : | 11775101416 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | DUMAI |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DUMAI DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Januari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Dumai
Up. Kakan Kesbangpol dan Linmas di Dumai
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

Jalan Puteri Tujuh Nomor 9, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur
DUMAI - RIAU

REKOMENDASI

Nomor : 071/II/2021/36

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai, setelah membaca surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pekanbaru Nomor : 503/DPMTSP/NON-IZIN-RISET/37899 tanggal 21 Januari 2021 perihal rekomendasi penelitian, dengan ini memberikan Rekomendasi yang dimaksud kepada :

| | |
|-----------------|--|
| Nama | : DWI RAMADHAN |
| Nomor Mahasiswa | : 11775101416 |
| Program Studi | : Administrasi Negara |
| Jenjang | : S.1 |
| Alamat | : Jln. Charli No. 07 Perum tahap IV Desa Balai Makam, Duri - Riau HP. 0812-7754-261 |

Untuk melakukan Penelitian/Pengumpulan Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai guna dijadikan pengumpulan data untuk Bahan Skripsi dengan Judul :

**" ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DUMAI DALAM MEWUJUDKAN
 KESETARAAN GENDER "**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Menjaga Tata Tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah setempat. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 3 (tiga) Bulan terhitung mulai tanggal 15 Februari s/d 15 Mei 2021.
3. Setelah selesai penelitian agar menyampaikan hasilnya kepada kami sebanyak 1 (satu) exemplar.

Demikian surat Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagai mana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kegiatan Riset ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Dumai
 Pada 15 Februari 2021

Plt KEPALA,

EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si
 Nip. 19660602 199003 1 005

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Dumai.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.
4. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Jl. Putri Tujuh Komplek Rumah Dinas Pemko Dumai Telp. (0765) 438880 Fax (0765) 438080
DUMAI

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 800/DPPPA-SEKR/II/7

Berdasarkan Surat Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Nomor : 071/II/2021/36 tanggal 15 Februari 2021 tentang Pelaksanaan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi mahasiswa/i nya Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, dengan ini menerangkan bahwa :

| | |
|-------------------|--|
| Nama | : DWI RAMADHAN |
| No.NIM | : 11775101416 |
| Fakultas | : Ekonomi dan dan Ilmu Sosial |
| Jurusan | : Ilmu Administrasi Negara |
| Judul Skripsi | : Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Dumai Dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender |
| Bidang Penelitian | : ADMINISTRASI NEGARA |

Benar namanya tersebut diatas telah melakukan Riset / Pra Riset dan Penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan, dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


 KEPALA,
DAMERIA, SKM, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640605 198603 2 006

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dwi Ramadhan, lahir pada tanggal 21 Desember 1998 di kota Dumai, penulis merupakan anak ke 3 dari 5 bersaudara dari ayah yang bernama Afdal Zen dan Ibu yang bernama Ida Rosida. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 073 Balai Makam Kecamatan Mandau pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan

Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 9 Mandau selesai pada tahun 2014, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Mandau selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis diterima melalui jalur SBMPTN.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Walikota Dumai tepatnya pada Bagian Umum Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Dumai. Dan juga penulis telah mengabdikan masyarakat dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggal 20 April penulis dinyatakan lulus sebagai sarjana dengan judul Skripsi “ Pelaksanaan Pengarusutaaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kota Dumai” penelitian di lakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



UIN SUSKA RIAU